



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR : 060/Kep.1449-Org/2019
TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA CIMAHI TAHUN 2019-2022

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2019-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Memperhatikan : Nota Dinas dari Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Cimahi kepada Wali Kota Cimahi Nomor 060/131/Org tanggal 2 Agustus 2019 tentang Penandatanganan Surat Keputusan Wali Kota Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2019-2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2019-2022.

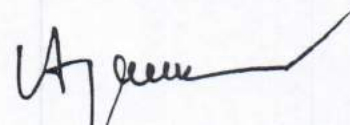
KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2019-2022.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2019-2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kota Cimahi, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kota Cimahi.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 14 Agustus 2019

WALI KOTA CIMAHI,



Lampiran
KEPUTUSAN WALI KOTA CIMAHI
Nomor :
Tanggal :
Tentang : INDIKATOR KINERJA
UTAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

TAHUN 2019-2022

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA
2	3	4	5	6	7
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul					
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan daya saing	IPM	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Sesuai Formulasi BPS	BPS
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan daya saing	IPM	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Sesuai Formulasi BPS	BPS
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan daya saing	LPP (LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK)	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Sesuai Formulasi BPS	BPS
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik					
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah	Indeks RB	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	NILAI AKIP	Nilai Hasil Evaluasi AKIP oleh KemenPAN-RB	KEMENPAN RB
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah	Indeks RB	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai Hasil Evaluasi LPPD Kemendagri	KEMENDAGRI
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah	Indeks RB	Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah	Opini BPK	Nilai Hasil Evaluasi oleh BPK	KEMENKEU

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA
2	3	4	5	6	7
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah	Indeks RB	Meningkatnya profesionalitas aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai Hasil Evaluasi oleh BKN	BKN
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah	Indeks RB	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Survey Kepuasan Masyarakat	Total nilai Persepsi per unsur x Nilai Penimbang Total unsur yang terisi ang	BAG ORGANISASI
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah	Indeks RB	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	Nilai Hasil Evaluasi oleh KemenPAN-RB	KEMENPAN RB
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah	Indeks RB	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE.	
Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil dan dalam upaya pengentasan kemiskinan					
Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi	LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi)	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi)	-	BPS
Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi	Indeks Gini	Meningkatkan pemerataan pendapatan	Indeks Gini	-	BPS
Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi	Angka Kemiskinan	Menurunnya kemiskinan	Angka Kemiskinan	-	BPS
Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi	TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)		TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)	-	BPS

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA
2	3	4	5	6	7
: Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan					
meningkatkan keselamatan dan kenyamanan transportasi	Tingkat Pelayanan Jalan / Level of Service (LOS)	Meningkatnya tingkat keselamatan dan kenyamanan transportasi	Tingkat Pelayanan Jalan / Level of Service (LOS)	$LOS = V/C$ $V = \text{Volume Lalu Lintas (smp/jam)}$	DISHUB
meningkatkan kualitas permukiman	Tingkat Pelayanan Sanitasi dan Air Bersih	Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan	Persentase pengelolaan sampah	$\frac{\text{Volume sampah yang terkelola}}{\text{Timbulan sampah secara keseluruhan}} \times 100\%$	DPKP
meningkatkan kualitas permukiman	Tingkat Pelayanan Sanitasi dan Air Bersih	Meningkatnya pelayanan air limbah domestik	Persentase cakupan layanan air limbah domestik	$\frac{\text{Jumlah titik air limbah yang belum terlayani}}{\text{jumlah titik air limbah}} \times 100\%$	DLH
meningkatkan kualitas permukiman	Tingkat Pelayanan Sanitasi dan Air Bersih	Meningkatnya pelayanan drainase permukiman	Persentase luasan genangan terhadap luas kota	$\frac{\text{Jumlah titik drainase yang belum terlayani}}{\text{jumlah titik drainase}} \times 100\%$	DPKP
meningkatkan kualitas permukiman	Tingkat Pelayanan Sanitasi dan Air Bersih	Meningkatnya pelayanan air bersih	Persentase cakupan pelayanan air bersih	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih}}{\text{jumlah rumah tangga yang belum memiliki akses air bersih}} \times 100\%$	DPKP
meningkatkan kualitas permukiman	Rasio luas kawasan kumuh	Mengurangi luas kawasan kumuh	Rasio luas kawasan kumuh	$\frac{\text{Jumlah permukiman kumuh tertangani (Ha)}}{\text{jumlah permukiman kumuh}} \times 100\%$	DPKP
meningkatkan ketahanan bencana	Indeks Resiko Bencana	Meningkatnya ketahanan bencana	Indeks Resiko bencana	Kapasitas Penanggulangan Bencana Daerah	BNPB
meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	$\frac{\text{Jumlah titik wilayah taman per luas taman dibagi}}{\text{total luas taman}} \times 100\%$	DPKP dan DLH

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA
2	3	4	5	6	7
Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan					
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengarusutamaan gender	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Jumlah kegiatan usulan masyarakat yang diakomodir jumlah kegiatan keseluruhan	BAG. PEMERINTAHAN
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengarusutamaan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Meningkatkan pengarusutamaan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	BPS	DINSOSP2KBP3A
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengarusutamaan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	BPS	DINSOSP2KBP3A

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA CIMAHI**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN IKU	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SUMBER DATA
2	3	4	UTAMA 5	6	7
2 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik					
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai AKIP Kota	Nilai Hasil Evaluasi AKIP oleh KemenPAN-RB	KEMENPAN-RB
			Nilai LPPD	Nilai Hasil Evaluasi LPPD Kemendagri	KEMENDAGRI
			Nilai Indeks RB	Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB oleh Kemenpan-RB	KEMENPAN-RB
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Total nilai Persepsi per unsur		PermenPAN-RB No. 14 Tahun 2017
			Total unsur yang terisi		

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT KOTA CIMAH**

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
MISI 2 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik						
1	Optimalnya tata kelola Pemerintahan	Indeks RB	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan Perangkat Daerah	Persentase PD dengan hasil evaluasi LKIP kategori BB	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah dengan LKIP Kategori BB}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi}} \times 100\%$	Laporan hasil evaluasi LKIP
2	Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah	Opini BPK	Meningkatkan implementasi SPP	Nilai Maturitas SPP	Nilai Hasil Evaluasi Maturitas SPP	Hasil Penilaian Maturitas SPP

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI**

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER
1	2	3	4	5	6	7
MISI 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul						
1	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang).	BPS Jawa
					Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah (MYS) dibutuhkan informasi:	
					a. Partisipasi sekolah	
					b. Jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/ sedang diduduki	
	Meningkatnya kualitas pendidikan		Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-Rata Nilai UN SMP	c. Ijazah tertinggi yang dimiliki d. Tingkat/ kelas tertinggi yang pernah/ sedang diduduki	
					$MYS = \frac{1}{P_{15}} \sum_{i=1}^{P_{15}} (Lama\ sekolah\ penduduk\ ke - i)$	
					Jumlah nilai US SD	
					Jumlah siswa kelas 6 SD yang mengikuti US	
				Rata-Rata Nilai UN SMP	Jumlah nilai UN SMP	Dinas Pendidikan
					Jumlah siswa kelas 9 SMP yang mengikuti UN	
					Jumlah siswa kelas 2 SD yang paham literasi	
					Persentase Siswa kelas 2 SD paham literasi	
					Jumlah siswa kelas 2 SD	Dinas Pendidikan
					$\frac{\text{Jumlah siswa kelas 2 SD yang paham literasi}}{\text{Jumlah siswa kelas 2 SD}} \times 100\%$	

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI**

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUM
1	2	3	4	5	6	
MISI 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul						
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	AKI PER 100.000 KH ; 101,5	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 Tahun $\times 100\%$	Bidang I
				AKB PER 1000 KH 7,10	jumlah kelahiran hidup di wilayah tsb pada kurun waktu yang sama $\times 100\%$	Bidang I
				Indeks Keluarga Sehat	Jumlah keluarga bernilai Y $\times 100\%$	Hasil rek pendataan Puskesmas
					Total keluarga-jumlah keluarga bernilai N	

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA CIMAHI

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
MTSI 4 : Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan						
1	Meningkatnya kenyamanan pengguna jalan kota	Persentase kemantapan jalan kota	Meningkatnya kemantapan jalan kota	Persentase tingkat kemantapan jalan kota	Panjang jalan kota dalam kondisi baik panjang seluruh jalan kota $\times 100\%$	DPUPR
2	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur bangunan	Persentase peningkatan kualitas bangunan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas gedung pemerintahan	Persentase bangunan pemerintahan yang memenuhi sertifikat laik fungsi	Bangunan Pemerintahan yang bersertifikat Jumlah bangunan Pemerintah $\times 100\%$	DPUPR
3	Meningkatnya kesesuaian pembangunan dengan rencana rinci tata ruang	Persentase kesesuaian pembangunan dengan rencana rinci tata ruang	Meningkatnya kepatuhan terhadap rencana rinci tata ruang	Persentase kesesuaian pembangunan terhadap kebijakan rencana tata ruang	Luas kawasan yang didirikan sesuai RTRW luas seluruh kawasan $\times 100\%$	DPUPR

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA CIMAH**

NO. 1	TUJUAN 2	INDIKATOR TUJUAN 3	SASARAN IKU 4	INDIKATOR KINERJA UTAMA 5	FORMULASI 6	SUM
MISI 4 : Merencanakan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan						
1	Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana Permukiman Yang Sehat dan Layak Bagi Masyarakat	Luas Kawasan Kumuh	Meningkatnya Perumahan Dan Kawasan Permukiman Yang Layak Huni	Persentase Rumah Layak Huni	Jumlah rumah layak huni $\frac{\text{Jumlah seluruh rumah di wilayah Pemda Ybs}}{\text{Luas Wilayah Kota}} \times 100 \%$	
				Luas Kawasan Kumuh Sedang dan Kumuh Ringan	$\frac{\text{Luas Kawasan Kumuh}}{\text{Luas Wilayah Kota}} \times 100 \%$	
			Meningkatkan Pelayanan Air Bersih/Air Minum	Persentase Cakupan Pelayanan Air Bersih/Air Minum	$\frac{\text{Persentase Penduduk Yang Terlayani Air Bersih/Air Minum}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100 \%$	
			Meningkatkan Pelayanan Air Limbah Domestik	Persentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik	$\frac{\text{Presentase Penduduk Yang Terlayani Air Limbah Domestik}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100 \%$	

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA CIMAHI

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUM
1	2	3	4	5	6	
MISI 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul						
1	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang terkendali	CPR (contraceptive Prevalence Rate)	Jumlah peserta KB aktif Jumlah pasangan usia subur	DINS x 100%
2	Meningkatnya kualitas hidup serta perlindungan perempuan dan anak	Tingkat capaian Kota Layak Anak	Meningkatnya kualitas hidup serta perlindungan perempuan dan anak	Tingkat capaian kota layak anak	Nilai skor penilaian Kota Layak Anak	Ke
MISI 3 : Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah d						
pengentasan kemiskinan						
3	Menurunnya kemiskinan	Angka kemiskinan	Meningkatnya taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup PMKS	Cakupan PMKS yang meningkat taraf hidup, kualitas dan kelangsungan hidupnya	Jumlah PMKS yang mendapat program pemenuhan kebutuhan dasar atau program rehabilitasi atau program pemberdayaan atau program perlindungan jaminan sosial Jumlah PMKS	DINS x 100%
MISI 5 : Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan						
4	Meningkatnya pengarusutamaan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Meningkatnya Pengarusutamaan gender	Tingkat indikator penilaian Anugrah Parahita Ekapraya yang dipenuhi	Nilai skor penilaian Anugrah Parahita Ekapraya	Ker

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN KOTA CIMAHI

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
MISI 3 : Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan						
1	Meningkatkan Daya Beli dan Kesejahteraan Masyarakat Berpendapatan Rendah	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Juta Rp/Tahun)	Meningkatnya UKM Yang Berdaya Saing	Presentase peningkatan omset UKM Presentase peningkatan jumlah tenaga kerja UKM	$\% = \frac{Omz(n) - Omz(n-1)}{Omz(n-1)} \times 100\%$ $\% = \frac{Lab(n) - Lab(n-1)}{Lab(n-1)} \times 100\%$	DATA SEKSI UKM DATA SEKSI UKM
2	Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi	Presentase Koperasi yang Berkualitas dan Berprestasi	Meningkatnya Koperasi yang Berdaya Saing	Presentase Koperasi yang Berdaya Saing	$\% = \frac{Kop(n) - Kop(n-1)}{Kop(n-1)} \times 100\%$ Kop(n): Koperasi Berdaya tahun ini Kop(n-1) Koperasi Berdaya tahun	DATA SEKSI KOPERASI
3	Meningkatkan Daya Saing Perdagangan	Presentase jumlah IKM siap ekspor dibanding seluruh IKM (Distribusi Net Ekspor terhadap PDRE)	Meningkatnya Sistem Distribusi Dan Usaha Perdagangan Serta Ekspor Daerah	Jumlah IKM yang Siap Ekspor		DATA SEKSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI
				Presentase kasus pelanggaran bahan pokok dan barang strategis di masyarakat yang ditindaklanjuti	$\% = \frac{Case(n)}{Case(s)} \times 100\%$ Case(n) : Kasus yang ditindaklanjuti	DATA SEKSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI (LAPORAN DARI KECAMATAN)
				Presentase Sarana dan Prasarana Perdagangan Layak Fungsi	$\% = \frac{Sarpras(LF)}{Sarpras(s)} \times 100\%$ Sarpras(LF): Sarpras Layak Fungsi Sarpras(s) : Sarpras yang ada	DATA SEKSI SARANA DAN PRASARANA PERDAGANGAN
			Berkurangnya titik konsentrasi pedagang informal	Presentase pengurangan titik konsentrasi pedagang informal	$PKL(n) : PKL \text{ tahun ini}$ $PKL(n-1) : PKL \text{ tahun lalu}$ $\% = \frac{IKM(n) - IKM(n-1)}{IKM(n-1)} \times 100\%$	DATA SEKSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI
4	Meningkatkan Daya Saing Industri	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB	Meningkatnya IKM Yang Berdaya Saing	Presentase IKM yang berdaya saing	$IKM(n) : IKM \text{ Berdaya tahun ini}$ $IKM(n-1) : IKM \text{ Berdaya tahun lalu}$	DATA BIDANG PERINDUSTRIAN

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIMAHI**

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER
1	2	3	4	5	6	
MISI 4 : Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan						
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Level Of Service (LOS)	Meningkatnya kelancaran lalu lintas	Tingkat Kelancaran lalu lintas (VCR)	Rasio antara volume kendaraan yang melintas dengan kapasitas jalan yang tersedia (VCR)	Dinas Perhut

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CIMAHI**

NO. 1	TUJUAN 2	INDIKATOR TUJUAN 3	SASARAN IKU 4	INDIKATOR KINERJA UTAMA 5	FORMULASI 6	SUMBER DATA 7
MISI 2 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik						
1	Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan yang sesuai standar waktu	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah dokumen kependudukan yang terbit tepat waktu}}{\text{Jumlah dokumen kependudukan yang sebaiknya terbit tepat waktu}} \times 100$	DISDURCAPIL
			Meningkatnya Pemanfaatan Database Kependudukan	Persentase Stakeholder yang memanfaatkan database kependudukan	$\frac{\text{Jumlah stakeholder yang telah memanfaatkan database kependudukan}}{\text{Jumlah stakeholder yang seharusnya melakukan pemanfaatan data}} \times 100$	DISDURCAPIL
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	$\frac{\text{Total nilai Persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times 100$	Permennan dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS TENAGA KERJA KOTA CIMAH**

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SU
1	2	3	4	5	6	
MISI 3 : Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dan pengentasan kemiskinan						
1	Meningkatkan Kesejahteraan Buruh/Tenaga Kerja serta Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Upahnya Minimal sesuai UMSK	Meningkatnya Kesejahteraan Buruh dan Keharmonisan Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan UMSK	Jumlah Perusahaan yang menerapkan UMSK	1
		Angka Perselisihan pengusaha pekerja per tahun		Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	Jumlah Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	
				Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Jumlah Pekerja/Buruh yang menjadi peserta Program Jamsostek	
2	Menurunkan Tingkat Pengangguran Kota Cimahi	Persentase Pengangguran di Kota Cimahi	Menurunkan Tingkat Pengangguran Kota Cimahi	Persentase Pengangguran di Kota Cimahi	Jumlah Pekerja sektor formal	DIS
					Jumlah warga kota cimahi yang menganggur	
					Angkatan Kerja di Kota Cimahi	

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA CIMAHI**

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
MISI 3 : Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam pengentasan kemiskinan						
1	Meningkatkan ketersediaan dan akses pangan penduduk	1. Nilai/ skor PPH Ketersediaan; 2. Nilai/ skor PPH Konsumsi	Meningkatkan Kuantitas ketersediaan dan konsumsi pangan	Presentase tingkat capaian ketersediaan energi dan protein perkapita terhadap standar ideal Presentase tingkat capaian konsumsi energi dan protein perkapita terhadap standar ideal	$\frac{\text{Total kebutuhan energi dan protein perorangan}}{\text{Angka kecukupan energi dan protein}} \times 100$ $\frac{\text{Total kebutuhan energi dan protein perorangan}}{\text{Angka kecukupan energi dan protein}} \times 100$	MWA Training Consulting pelatihan dan pengembangan Ketahanan Pangan)
2	Meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Presentase peningkatan nilai PDRB sektor pertanian	Meningkatkan produksi/ produktivitas pertanian, peternakan, dan perikanan	Presentase peningkatan produktivitas hasil tanaman padi (%)	$\frac{\text{Jumlah Produksi padi yang dihasilkan}}{\text{Jumlah produksi padi tahun sebelumnya}} \times 100$	DISPANGTAN
				Presentase peningkatan produksi susu (%)	$\frac{\text{Jumlah produksi susu (liter)}}{\text{Jumlah produksi susu tahun sebelumnya}} \times 100$	DISPANGTAN
				Presentase peningkatan produksi ikan budidaya	$\frac{\text{Jumlah produksi ikan (ton)}}{\text{jumlah produksi ikan tahun sebelumnya}} \times 100$	DISPANGTAN
				Presentase rata-rata peningkatan PAD dari sektor perikanan dan pertanian	$\frac{\text{Jumlah Presentase PAD dari tiap2 unit penghasil}}{\text{jumlah unit penghasil}} \times 100$	DISPANGTAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA CIMAHI

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
MISI 3 : Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan						
1	Meningkatnya Parwisata sebagai Sumber Pendapatan Masyarakat	Jumlah PAD Sektor Parwisata	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Parwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman)	-	Disbudparpora Kota Cimahi
				Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara (Wisnus)	-	Disbudparpora Kota Cimahi
				Long of Stay (lama kunjungan wisata)	-	Disbudparpora Kota Cimahi
MISI 5 : Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan						
2	Mengembangkan Destinasi Parwisata Unggulan Berbasis Kreatif dan Budaya Lokal	Persentase Kebudayaan yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan	Persentase kebudayaan yang dilestarikan dan dikembangkan	Jumlah kebudayaan yang dilestarikan dan dikembangkan Jumlah seluruh potensi kebudayaan $\times 100\%$	Disbudparpora Kota Cimahi
3	Meningkatkan Pelayanan Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Pemuda terhadap Pembangunan	Jumlah Pemuda yang Berpartisipasi Jumlah Pemuda Kota Cimahi $\times 100\%$	Disbudparpora Kota Cimahi
4	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga	Persentase Masyarakat yang Aktif Berolahraga	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga dan Prestasi Olahraga	Persentase Masyarakat yang Aktif Berolahraga	Jumlah Masyarakat Berolahraga Min. 1 x Seminggu Jumlah Masyarakat Keseluruhan $\times 100\%$	Disbudparpora Kota Cimahi
				Persentase Atlet yang Berprestasi	Jumlah Atlet yang Berprestasi dibagi Jumlah Atlet yang Berpartisipasi $\times 100\%$	Disbudparpora Kota Cimahi

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIMAHI

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUM
1	2	3	4	5	6	
MISI 2 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik						
1	Meningkatkan laju pertumbuhan investasi	Laju Pertumbuhan Investasi	Meningkatnya kualitas pelayanan Perijinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi	Permen Nomor 1 2017
			Meningkatnya realisasi investasi		Nilai realisasi tahun n - Nilai realisasi tahun n- 1	
						DPMPRS SIUP, TL

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA CIMAHI**

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER
1	2	3	4	5	6	7
MISI 4 : Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan						
1	Meningkatkan Pelayanan Pengelolaan Persampahan	Presentase Pengelolaan Sampah	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Persampahan	Prosentase Pengelolaan Sampah	$\frac{\text{Volume Sampah Yang Terkelola}}{\text{Timbulan Sampah secara Keseluruhan}} \times 100\%$	Bidang Pengce- Sampah, Lim dan Peningka Kapasitas
			Terwujudnya Perlindungan dan Pengelolaan Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	Ditentukan melalui Status Mutu Air yang dihitung dengan Metode STORET atau Metode Indeks Pencemaran sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air	Bidang Penaa Hukum Lingk
2	Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Terwujudnya Perlindungan dan Pengelolaan Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	$IKU = 100 - [50/0,9 \times (I_{eu} - 0,1)]$ $I_{eu} = \text{Rata-rata Indeks } SO^2 \text{ dan Indeks } NO^2$ $IKTL = 100 - (84,3 - (TH \times 100) \times 50/54,3)$	Bidang Penaa Hukum Lingk
			Terwujudnya Perlindungan dan Pengelolaan Kualitas Ruang Terbuka Hijau	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Ket : TH = Tutupan Hutan Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.1/PPKL/PKLAT/PKL.4/1/2018 tentang Pedoman Penghitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Pengelolaan Tutupan Lahan	Bidang Tata Lingkungan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA CIMAHI**

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
MISI 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul						
1	Meningkatkan literasi membaca masyarakat	Presentase peningkatan pemustaka aktif	Meningkatnya akses membaca masyarakat	Presentase pemustaka aktif	Jumlah Kunjungan Anggota Perpustakaan Jumlah Kunjungan Anggota Perpustakaan Tahun Sebelumnya $\frac{\text{Jumlah Kunjungan Anggota Perpustakaan}}{\text{Jumlah Kunjungan Anggota Perpustakaan Tahun Sebelumnya}} \times 100$	Diskominfoarpus
MISI 2 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik						
2	Meningkatkan penyelenggaraan statistik sektoral daerah	Presentase data sektoral yg dapat disajikan tepat waktu	Meningkatnya tata kelola statistik sektoral daerah	Presentase Perangkat daerah yang telah melakukan integrasi data statistik sektoral	Jumlah Perangkat Daerah Yang Telah Melakukan Integrasi Data Statistik Sektoral $\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah Yang Telah Melakukan Integrasi Data Statistik Sektoral}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100$	Diskominfoarpus
3	Meningkatkan penyelenggaraan e-government	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Meningkatnya tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	-	Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE.
4	Meningkatkan penyelenggaraan kearsipan daerah	Indeks LAKE (Laporan Audit Kearsipan Eksternal)	Meningkatnya kinerja kearsipan daerah pada pencipta arsip	Indeks LAKE (laporan Audit Kearsipan Eksternal)	-	Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan

INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA CIMAHI

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER
1			2	3	4	5
MISI 1 : Konsisten dalam penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat						
1	Terwujudnya Ketertiban Umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat	Angka Gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase penurunan titik rawan tranribumas	$\frac{\text{Titik rawan gangguan tranribum tahun ini} - \text{titik rawan tranribum tahun lalu}}{\text{Titik Rawan Tranribum Tahun Lalu}} \times 100\%$	Satpol PP Pemadam Kebakaran
MISI 2 : Meningkatkan dan memberikan pelayanan terbaik dalam perlindungan masyarakat dari bahaya kebakaran dan bencana lainnya						
2	Menurunkan Jumlah Kejadian Kebakaran	Indeks Resiko Kebakaran	Meningkatnya kesiapsiagaan tanggap kebakaran	Persentase wilayah yang tanggap bencana kebakaran	$\frac{\text{Jumlah Wilayah Management Kebakaran}}{\text{Luas Wilayah Kota}} \times 100\%$	Satpol PP Pemadam Kebakaran

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA	
1	2	3	4	5	6	7	
MISI 2 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik							
1	Terwujudnya kualitas perencanaan pembangunan yang akuntabel	Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras antar tahapan perencanaan	Persentase Renstra selaras dengan RPJMD	Jumlah Program pada Renstra SKPD yang selaras dengan tujuan/ sasaran dibagi	BAPPEDA	
				Persentase Renja selaras dengan RKPD	Jumlah Program yg ada pada RPJMD		
				Persentase RKPD selaras dengan RPJMD	Jumlah Kegiatan pada Renja		
				Jumlah Program yg ada pada RKPD	X 100%		
				Jumlah Program pada RKPD	X 100%		
1	Terwujudnya kualitas perencanaan pembangunan yang akuntabel	Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP	Terwujudnya hasil penelitian dan pengembangan yang dapat dimanfaatkan/ diterapkan	Persentase hasil- hasil kajian penelitian yang bermanfaat untuk peningkatan kinerja pemerintahan	Jumlah hasil penelitian yang bermanfaat bagi pemerintah	BAPPEDA	
				Jumlah seluruh hasil kajian yang ada	X 100%		
				Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan di perangkat daerah dan masyarakat	Jumlah inovasi yang diusulkan di perangkat daerah dan masyarakat		BAPPEDA
				X 100%			
2	Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Presentase APBD kegiatan yang merupakan usulan masyarakat	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase kegiatan yang mengkomodir usulan masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Jumlah usulan yang masuk RKPD	BAPPEDA	
				Jumlah usulan masyarakat	X 100		
MISI 5: PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SECARA BERKESINAMBUNGAN DAN BERKELANJUTAN							

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER
1	2	3	4	5	6	7
MISI 2 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik						
1	Teroptimalisasinya kualitas tata kelola keuangan daerah	Presentase Kesesuaian Laporan Keuangan SKPD sesuai dengan SAP	Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah	Presentase Kesesuaian Laporan Keuangan SKPD sesuai dengan SAP	Jumlah Laporan Keuangan PD yang sesuai SAP/	BPKAL
		Jumlah Laporan Keuangan PD				
		Penetapan APBD tepat Waktu		Penetapan APBD tepat Waktu	jumlah APBD murni tahun berkenaan yang tepat waktu/	BPKAL
		jumlah APBD murni tahun berkenaan				
		Rasio Utilisasi Aset		Rasio Utilisasi Aset	Jumlah Nilai Aset Tetap yang telah diutlisasi tahun berkenaan/	
jumlah nilai aset tetap sesuai Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) unaudited tahun berkenaan						
					BPKAL	

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH**

NO. 1	TUJUAN 2	INDIKATOR TUJUAN 3	SASARAN IKU 4	INDIKATOR KINERJA UTAMA 5	FORMULASI 6	SUMBER 7
MISI 2 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik						
1.	Meningkatkan Desentralisasi Fiskal	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	Meningkatnya PAD dari Tahun Sebelumnya	Persentase (%) Peningkatan PAD per Tahunnya	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah } n - \text{Pendapatan Asli Daerah } (n-1)}{\text{Pendapatan Asli Daerah } (n-1)} \times 100\%$	BAPPE

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

NO. 1	TUJUAN 2	INDIKATOR TUJUAN 3	SASARAN IKU 4	INDIKATOR KINERJA UTAMA 5	FORMULASI 6	SUMBER
MISI 2 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik						
1	Meningkatnya profesionalitas aparatur	Indeks profesionalitas ASN	Meningkatnya kompetensi dan kualifikasi pegawai	Persentase ASN yang memenuhi syarat kompetensi dan kualifikasi pendidikan dalam pelaksanaan tugas jabatan	Bobot Indikator Kompetensi * Rating Jawaban Indikator Kompetensi Bobot Indikator Kualifikasi * Rating Jawaban Indikator Kualifikasi	Sim ASN
			Meningkatnya Kinerja Pegawai	Persentase Penurunan tingkat pelanggaran disiplin pegawai	Bobot Indikator Disiplin * Rating Jawaban Indikator Disiplin	SKP On lapkin
				Persentase Pegawai yang nilai SKPrnya 80	Bobot Indikator Kinerja * Rating Jawaban Indikator Kinerja	Sim ASN
			Meningkatnya pelayanan kepegawaian	Persentase PNS yang mampu ditempatkan sesuai dengan kompetesinya Persentase pelayanan kepegawaian yang sesuai dengan ketentuan (Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian)	- -	Sim ASN

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA CIMAHI**

NO. 1	TUJUAN 2	INDIKATOR TUJUAN 3	SASARAN IKU 4	INDIKATOR KINERJA UTAMA 5	FORMULASI 6	SUM
MISI 4 : Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan						
1	Menurunnya Ancaman Bencana	Indeks Resiko bencana	Meningkatnya Rasio Wilayah Yang Siap Menghadapi Bencana	Persentase Wilayah Yang Siap Menghadapi Bencana	Jumlah wilayah tangguh bencana	
					$\frac{\text{Seluruh wilayah}}{\text{Jumlah kejadian bencana yang ditanggulangi selama satu tahun}} \times 100\%$	
					$\frac{\text{Seluruh korban bencana yang dibantu}}{\text{Seluruh korban bencana}} \times 100\%$	

INDIKATOR KINERJA UTAMA **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA CIMAHI**

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER
1	2	3	4	5	6	7
MISI 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul						
1	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Rujukan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase Tenaga medis sesuai dengan standar klasifikasi RS tipe B	Jumlah tenaga medis sesuai standar klasifikasi RS yang tersedia $\times 100\%$ Jumlah tenaga medis RS Kelas B Non Pendidikan	BIDANG PELA
				Persentase Tenaga keperawatan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi	Jumlah tenaga keperawatan yang sesuai dengan standar kompetensi $\times 100\%$ Jumlah tenaga keperawatan yang ada	BIDANG KEPERAWATAN
				Nilai evaluasi Kemudahan prosedur pelayanan	Bobot nilai rata-rata tertimbang $\frac{\text{Jumlah Bobot 1}}{\text{Jumlah bobot a}} \times \frac{1}{x} = N$	BIDANG PELAYANAN
				Nilai evaluasi Respon terhadap pengaduan pelayanan	Bobot nilai rata-rata tertimbang $\frac{\text{Jumlah Bobot 1}}{\text{Jumlah bobot a}} \times \frac{1}{x} = N$	BIDANG UMUM
				Nilai evaluasi kecepatan pelayanan	Bobot nilai rata-rata tertimbang $\frac{\text{Jumlah Bobot 1}}{\text{Jumlah bobot a}} \times \frac{1}{x} = N$	BIDANG PELAYANAN
				Kepuasan Pelanggan	Total dari nilai Persagi Per Unsur $\times \text{Nilai Pembandingan}$ Total unsur yang terisi	BIDANG PELAYANAN UMUM KEUANGAN

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KANTOR KESATUAN BANGSA KOTA CIMAHI**

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER
1	2	3	4	5	6	7
MTSI 5 : Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan						
1	Meningkatnya situasi dan kondisi yang kondusif di daerah	Angka Konflik	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan politik	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu	Jumlah Partisipan Pemilu	KPU
				Persentase partisipasi masyarakat dalam organisasi kemasyarakatan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dlm ormas	
				Persentase potensi konflik sara yang dapat dicegah dan ditangani	Potensi konflik sara yang dapat dicegah dan ditangani	KESBA
				Menurunnya konflik sara	Jumlah Konflik Sara	

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI**

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SU
1	2	3	4	5	6	
MISI 5 : Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan						
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Total Nilai per Unsur X nilai penimbang	Perm 14 T
					Total unsur yang terisi	


WALI KOTA CIMAHI,
AJAY MUHAMMAD PRIATNA